

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya dan Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11.2 (2015): 611-628.
- BPK. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Darwanis, Chairunnisa. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol 6 No.2 : 150-174. Universitas Syiah Kuala.
- Fisman, Gatti. 2002. "Decentralization and Corruption : Evidence from U.S. Federal Transfer Programs", *Public Choice*, Vol.113, No.1/2 (Oct, 2002), pp. 25-35.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Cetakan Kelima. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi kelima. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartanto, R. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Heriningsih, Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Buletin Ekonomi*, Vol. 11, No.1, hal 1-86.
- [Http://blorakab.go.id/index.php/public/transparansi](http://blorakab.go.id/index.php/public/transparansi)
- [Http://bppkad.grobogan.go.id/transparansi-anggaran](http://bppkad.grobogan.go.id/transparansi-anggaran)
- [Http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=143](http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=143)
- [Http://kuduskab.go.id/category/keuangan](http://kuduskab.go.id/category/keuangan)

[Http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/11/67/keuangan.html](http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/11/67/keuangan.html)

[Http://open-tpad.brebeskab.go.id/](http://open-tpad.brebeskab.go.id/)

[Http://pekalongankab.go.id/v2/publik/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah](http://pekalongankab.go.id/v2/publik/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah)

[Http://plid.purbalinggakab.go.id/informasi-berkala/](http://plid.purbalinggakab.go.id/informasi-berkala/)

[Http://portal.sukoharjokab.go.id/?s=lkpd](http://portal.sukoharjokab.go.id/?s=lkpd)

[Http://ppid.jepara.go.id/daftar-informasi-berkala/](http://ppid.jepara.go.id/daftar-informasi-berkala/)

[Http://ppid.kebumenkab.go.id/web/document/berkala](http://ppid.kebumenkab.go.id/web/document/berkala)

[Http://ppid.klatenkab.go.id/web/transparansi-anggaran/](http://ppid.klatenkab.go.id/web/transparansi-anggaran/)

[Http://ppid.magelangkab.go.id/infopublik?jenis=informasi setiap saat](http://ppid.magelangkab.go.id/infopublik?jenis=informasi setiap saat)

[Http://ppid.magelangkota.go.id/informasi-berkala-ppid/](http://ppid.magelangkota.go.id/informasi-berkala-ppid/)

[Http://ppid.pekalongankota.go.id/info2-informasi-berkala.html](http://ppid.pekalongankota.go.id/info2-informasi-berkala.html)

[Http://ppid.semarangkab.go.id/index.php/2016-03-28-02-19-49/daftar-informasi-berkala](http://ppid.semarangkab.go.id/index.php/2016-03-28-02-19-49/daftar-informasi-berkala)

[Http://ppid.semarangkota.go.id/pages/informasi-berkala](http://ppid.semarangkota.go.id/pages/informasi-berkala)

[Http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=58](http://ppid.sragenkab.go.id/?page_id=58)

[Http://ppid.surakarta.go.id/info/informasi-berkala/laporan-keuangan](http://ppid.surakarta.go.id/info/informasi-berkala/laporan-keuangan)

[Http://ppid.tegalkab.go.id/file/informasi-berkala](http://ppid.tegalkab.go.id/file/informasi-berkala)

[Http://purworejokab.go.id/web/TransparansiAPBD/pertanggung-jawaban.html](http://purworejokab.go.id/web/TransparansiAPBD/pertanggung-jawaban.html)

[Http://salatigakota.go.id/InfoKeuanganList.php](http://salatigakota.go.id/InfoKeuanganList.php)

[Http://wonogirikab.go.id/web/page/137/informasi_pengelolaan_keuangan](http://wonogirikab.go.id/web/page/137/informasi_pengelolaan_keuangan)

[Http://www.karanganyarkab.go.id/?s=Transparansi](http://www.karanganyarkab.go.id/?s=Transparansi)

[Http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/daftar-informasi-berkala](http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/daftar-informasi-berkala)

[Https://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/rb-284/apbd](https://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/rb-284/apbd)

[Https://batangkab.go.id/?p=18&id=37](https://batangkab.go.id/?p=18&id=37)

[Https://kendalkab.go.id/pemerintahan/detail/transparansi](https://kendalkab.go.id/pemerintahan/detail/transparansi)

https://ppid.wonosobokab.go.id/postings/detail/1029181/PPID_Utama.HTML

<https://putusan.makamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/periode/putus/2014>

<https://putusan.makamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/periode/putus/2015>

<https://putusan.makamahagung.go.id/pengadilan/pn-semarang/periode/putus/2016>

<https://rembangkab.go.id/keuangan-daerah>

<https://www.banyumaskab.go.id/page/26597/transparansi>

<https://www.patikab.go.id/v2/id/informasi-keuangan/>

<https://www.pemalangkab.go.id/apbd>

Ikhwan *et.al.* 2016. “ The Influence of Accountability on Clean-Corruption Perception in Local Goverment.”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016.

Irawanti. 2015. *Pengaruh Good Local Governance, Net Ekspor, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja dan Pendapatan Daerah Terhadap Korupsi*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Khairudin, Erlanda. 2016. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, No. 2

kpk.go.id

Kurniawan, T. 2009. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, 116-121.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Masyitoh, R. D., Wardhani, R., dan Setyanigrum, D. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Nugroho. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*

Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2014. Melalui otda.kemendagri.go.id

Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2015. Melalui otda.kemendagri.go.id

Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2016. Melalui otda.kemendagri.go.id

Ritonga dan Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia : Berbasis Website. ***Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia.***

Saputra. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi di Indonesia. ***Jurnal Borneo Administrator***, Volume 8, Nomor 3.

Sasana. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. ***Jurnal Ekonomi Pembangunan***, Vol. 10, No.1, hal.103-124

Setiawan, W. 2012. ***Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.*** Skripsi. Universitas Diponegoro.

Sitorus, Rahayu. 2018. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang disurvei oleh KPK Tahun 2013). ***E-proceeding of Management*** : Vo.5, No.2 Agustus 2018.

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2014. Melalui <https://jateng.bps.go.id>

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2015. Melalui <https://jateng.bps.go.id>

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2016. Melalui <https://jateng.bps.go.id>

Supriyanto. 2011, Desentralisasi Fiskal dan korupsi : Fakta Dalam Otonomi Daerah di Indonesia, Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tuanakotta, T. M. 2010. ***Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.*** Jakarta: Salemba Empat.

[Wordpress.com/2008/09/04/fraudtriangle-segitiga.fraud](https://wordpress.com/2008/09/04/fraudtriangle-segitiga.fraud).

Wulandari. 2015. ***Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia***. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

www.hukumonline.com/Jakarta/19/11/2013

www.voaindonesia.com/07/01/2016